

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN (Studi di Desa Wori Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara)

Oleh :
Nova Sombang¹

ABSTRAK

Pembangunan dengan melibatkan partisipasi masyarakat merupakan salah satu upaya untuk memberdayakan masyarakat dalam merencanakan pembangunan yang berkaitan dengan sumber daya lokal berdasarkan kajian musyawarah. Partisipasi bukan sekedar salah satu tujuan dari pembangunan nasional, tetapi merupakan bagian yang integral dalam proses pembangunan. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini akan mengkaji bentuk partisipasi masyarakat Desa Wori Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara dalam perencanaan pembangunan, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dari hasil penelitian ditemukan bentuk partisipasi masyarakat Desa Wori dalam perencanaan pembangunan adalah dalam keterlibatan dalam mengikuti rapat rencana pembangunan di desa masih kurang aktif. Hal itu masih perlu di tingkatkan karena masih banyak masyarakat yang belum berpartisipasi dan terlibat secara langsung dalam proses pembuatan perencanaan program pembangunan yang akan di laksanakan setiap tahunnya. Hal yang menjadi kendala sehingga masyarakat kurang berpartisipasi dan kurang aktif dalam mengikuti rapat perencanaan pembangunan adalah kurangnya dilibatkan masyarakat secara aktif dalam pembuatan rencana pembangunan di desa sehingga menyebabkan kurang terjalin kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan desa. Selain itu yang menjadi permasalahan yang mendasar adalah komunikasi yang tidak baik, yang dibuktikan banyak yang tidak tahu tentang pelaksanaan musrembang karena mereka tidak mendapat undangan/ panggilan dari pemerintah desa.

Kata Kunci : Partisipasi; Perencanaan; Pembangunan

ABSTRACT

Development by involving community participation is an effort to empower the community in planning development related to local resources based on deliberation studies. Participation is not just one of the goals of national development, but is an integral part of the development process. By using a qualitative descriptive research method, this study will examine the form of community participation in Wori village, Wori sub-district, North Minahasa district in development planning, as well as the factors that influence it. From the results of the research, it was found that the form of participation of the Wori village community in development planning was that their involvement in participating in development planning meetings in the village was still less active. This still needs to be improved because there are still many people who have not participated and are directly involved in the planning process of development programs that will be carried out every year. The thing that becomes an obstacle so that the community does not participate and is less active in participating in development planning meetings is the lack of active involvement of the community in the making of development plans in the village, resulting in less good cooperation between the government and the community in implementing village development. In addition, the fundamental problem is poor communication, which is proven by many who do not know about the implementation of musrembang because they do not receive invitations / calls from the village government.

Keywords: Participation; Planning; Development

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

PENDAHULUAN

Pada hakekatnya tujuan pembangunan suatu Negara dilakukan atau dilaksanakan untuk mensejahterakan masyarakat, demikian halnya dengan Negara Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dan keamanan dunia.

Berdasarkan Undang-Undang no 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU no 6 tahun 2014 tentang Desa. Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal-usul dan / hak tradisional yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.

RPJM Desa adalah rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu 6 tahun. Sedangkan RKP Desa adalah rencana pembangunan tahunan desa yang kemudian disebut dengan rencana kerja pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 tahun. Baik RPJM Desa dan RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa yang kemudian menjadi dasar pedoman dalam penyusunan APB Desa. Untuk RPJM Desa ditetapkan maksimal 3 bulan setelah kepala desa dilantik. Sedangkan RKP Desa di susun oleh pemerintah desa mulai bulan juli ditetapkan maksimal akhir bulan September tahun berjalan. Pembangunan adalah sesuatu yang dari, oleh dan untuk masyarakat. Sehingga pembangunan bukanlah suatu yang direncanakan, dilaksanakan dan dimaksudkan untuk kepentingan segolongan atau sekelompok warga masyarakat.

Pengertian merumuskan perencanaan pembangunan itu tidak berarti bahwa ide-ide yang berkaitan dengan rumusan kegiatan dan cara mencapai tujuan hanya dilakukan sendiri oleh kelompok tertentu, akan tetapi mereka sekedar merumuskan ide-ide atau aspirasi yang dikehendaki oleh seluruh masyarakat melalui suatu mekanisme yang disepakati. Sedangkan perencanaan pembangunan diurus yang paling bawah disalurkan melalui pertemuan kelompok atau permusyawaratan pada lembaga yang terbawah secara formal maupun informal.

Dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 dijelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dijelaskan pada bagian ketiga bahwa dalam pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan gotong royong guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan social.

Pembangunan harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individu maupun kelompok-kelompok social yang ada didalamnya. Dalam penyelenggaraan pembangunan tahapan yang paling awal dan merupakan tahap yang paling vital adalah perencanaan. Perencanaan merupakan suatu hal yang paling menentukan keberhasilan yang akan dilaksanakan oleh suatu Negara. Oleh karena itu dalam perencanaan pembangunan pemerintah perlu melibatkan segenap kemampuan dan kemauan yang dimiliki oleh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan (partisipatif). Oleh karena itu pemerintah dalam menjalankan proses-proses pemerintahan dalam membangun masyarakat harus menekankan perlunya partisipasi masyarakat dengan beragam kepentingan atau latar belakang yang berbeda. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan tersebut maka banyak aspek yang harus diperhatikan diantaranya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Pembangunan tidak akan bergerak maju apabila salah satu komponen dari tata pemerintahan tidak berperan atau berfungsi karena musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) desa merupakan forum dialogis antara pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendiskusikan dan menyepakati program pembangunan yang dapat memajukan desa.

Pembangunan melalui partisipasi merupakan salah satu upaya untuk memberdayakan masyarakat dalam merencanakan pembangunan yang berkaitan dengan sumber daya lokal berdasarkan kajian musyawarah. Musyawarah dilakukan dalam peningkatan aspirasi melalui keinginan atau kebutuhan yang ada dalam masyarakat.

Partisipasi masyarakat merupakan modal utama untuk mencapai sasaran program pemerintah, perlunya keterlibatan masyarakat dianggap sangat penting karena pembangunan yang terlalu menekan peran pemerintah mendapat kritik tajam dimana kurang peka terhadap kebutuhan masyarakat. Pembangunan yang mengutamakan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan berarti memberi peluang seluas luasnya kepada masyarakat untuk mengarahkan sumber daya, potensi, merencanakan serta memberi keputusan dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan mensejahterakan masyarakat sehingga masyarakat berdaya.

Demikian juga yang terjadi pada proses perencanaan pembangunan di Desa Wori Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara dimana partisipasi masyarakat sangatlah penting guna membantu pemerintah dalam merencanakan program pembangunan di desa sehingga akan timbul suatu program dari prakarsa dan swadaya serta gotong-royong dari masyarakat. Atas dasar inilah masyarakat perlu terus di tumbuhkan dan di tingkatkan sehingga nantinya partisipasi masyarakat akan di rasakan sehingga akan menjadi kewajiban yang lahir secara spontan.

Namun pada kenyataannya tidak semua anggota ikut berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan dengan berbagai alasan dan dengan adanya faktor-faktor lain yang mempengaruhi masyarakat untuk tidak ikut berpartisipasi. Disini pentingnya upaya pemerintah untuk meyakinkan masyarakat tentang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan yaitu dengan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat atau sebaliknya. Keadaan seperti inilah yang nantinya akan merubah cara berpikir sikap maupun tindakan yang selanjutnya akan menjadi dukungan bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi secara aktif.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Partisipasi Masyarakat

- **Pengertian Partisipasi**

Partisipasi sebenarnya berasal dari bahasa inggris yaitu dari kata "participation" yang dapat diartikan suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan di ikut sertakan atau mengambil bagian dalam kegiatan suatu organisasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, partisipasi merupakan keterlibatan aktif masyarakat atau partisipasi tersebut dapat berarti keterlibatan proses penentuan arah dari strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Sedangkan dalam kamus lengkap bahasa Indonesia "partisipasi" berarti hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan keikutsertaan.

Menurut Histiraludin (dalam Handayani, 2006: 39-40) mengemukakan partisipasi lebih pada alat sehingga dimaknai partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat secara aktif, dalam ketelibatan seluruh proses kegiatan sebagai media penumbuh kohesifitas antar masyarakat, masyarakat dengan pemerintah juga mengalang rasa memiliki dan tanggung jawab pada program yang di lakukan. Istilah partisipasi sekarang ini menjadi kata kunci dalam setiap program pengembangan masyarakat, seolah-olah menjadi model baru yang harus melekat pada setiap rumusan kebijakan dan proposal proyek. Dalam pengembangannya sering kali di ucapkan berulang-ulang tetapi kurang di praktekan sehingga cenderung kehilangan makna. Partisipasi sepadan dengan arti peran serta, ikut serta, keterlibatan atau proses bersama saling memahami, merencanakan, menganalisis dan melakukan tindakan oleh sejumlah anggota masyarakat.

Menurut Mardijono (2008 :19) mengemukakan partisipasi diartikan sebagai upaya peran serta masyarakat dalam suatu kegiatan baik dalam bentuk pernyataan maupun kegiatan. Lebih lanjut dijelaskan partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam program-program pembangunan.

Menurut Made Pirdata (dalam Siti Irene Astuti Dwiningrum, 2011:50) partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimiliki dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan.

Menurut Theodorson (dalam Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, 2012:81) menyatakan bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang didalam kelompok sosial

untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya, diluar pekerjaan dan profesinya sendiri. Keikutsertaan tersebut dilakukan sebagai akibat dari terjadinya interaksi sosial antara individu yang bersangkutan dengan anggota masyarakat yang lain.

Menurut Davis dan Newstorm yang di kutip Remiswal (2013 :29) mengatakan bahwa partisipasi adalah keterlibatan mental atau emosional orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi pada tujuan kelompok dan berbagai tanggung jawab untuk mencapainya. Sedangkan dalam (Remiswal 2013 : 31) berpendapat bahwa partisipasi adalah kesediaan masyarakat secara suka rela untuk membantu kelangsungan program-program pemerintah yang tercermin dari pikiran, sikap dan tindakan mereka berdasarkan model kerangka partisipasi yang di kembang baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun tahap pengambilan manfaat dari program yang terdapat di lingkungan tempat tinggal mereka.

Purnamasari (2008:52-52) menyatakan bahwa perencanaan pembangunan tanpa memperhatikan partisipasi masyarakat akan menjadi perencanaan di atas kertas. Berdasarkan pandangannya partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dapat dilihat dari 2 hal yaitu :

1. Partisipasi dalam Perencanaan

Segi positif partisipasi dalam perencanaan adalah program-program pembangunan yang telah direncanakan bersama sedangkan segi negatifnya adalah adanya kemungkinan tidak dapat dihindari pertentangan antar kelompok dalam masyarakat yang dapat menundah atau bahkan menghambat tercapainya keputusan bersama.

2. Partisipasi dalam Pelaksanaan

Segi positif partisipasi dalam pelaksanaan adalah bahwa dari program telah selesai dikerjakan, tapi segi negatifnya adalah kecenderungan menjadikan warga Negara sebagai objek pembangunan, dimana warga hanya menjadi pelaksana pembangunan tanpa di dorong dan mengerti permasalahan pembangunan yang sedang dihadapi.

Melihat dari beberapa penjelasan sumber diatas maka dapat disimpulkan partisipasi adalah suatu keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang memperlihatkan keikutsertaannya dalam program atau kegiatan dan dalam kegiatan tersebut seseorang atau sekelompok orang mengambil bagian dalam kegiatan tersebut, diluar pekerjaan dan profesinya sendiri, keterlibatan tersebut berupa mental atau emosi serta fisik dalam melakukan segala kemampuan yang di miliki.

- **Bentuk – Bentuk Partisipasi**

Ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan dalam suatu program pembangunan yaitu : partisipasi uang, partisipasi benda, partisipasi tenaga, partisipasi buah pikiran dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Menurut Dulsseldrop (dalam Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, 2012:84) mendefinisikan beragam bentuk – bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat dapat berupa :

1. Menjadi anggota-anggota kelompok masyarakat
2. Melibatkan diri pada diskusi kelompok
3. Melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan organisasi untuk mengarahkan partisipasi masyarakat lain
4. Mengarahkan sumber daya masyarakat
5. Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan
6. Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya.

Menurut Cohen dan Uphoff (dalam Dwiningrum, 2011:61) bahwa partisipasi masyarakat dibedakan dalam empat jenis yaitu :

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Partisipasi ini sangat penting karena pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternative berdasarkan pertimbangan yang menyeluruh dan bersama. Di butuhkan kesepakatan dan suara mufakat karena bagaimana pun juga kegiatan tersebut terselenggara demi kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan

keputusan ini bermacam-macam seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

2. Partisipasi dalam pelaksanaan

Partisipasi ini adalah jenis partisipasi yang menjadi salah satu unsur penentu dalam keberhasilan program itu sendiri. Ruang lingkup partisipasi dalam pelaksanaan meliputi mengerahkan sumber daya dan dana, kegiatan administrasi dan koordinasi penjabaran program.

3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat

Partisipasi ini terkait dengan kualitas dari hasil pelaksanaan yang dicapai.

4. Partisipasi dalam evaluasi

Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program berjalan, apakah sudah sesuai dengan tujuan yang ingin di capai atau belum.

Menurut Effendi (dalam Dwiningrum, 2011:58) bahwa bentuk partisipasi terbagi menjadi partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal. Di sebut partisipasi vertikal karena terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan di masyarakat berbeda sebagai status bawahan, pengikut, atau klien. Sedangkan dalam partisipasi horizontal masyarakat mempunyai prakarsa di mana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya. Partisipasi semacam ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

Menurut Raharjo (dalam Totok Mardikanto dan poerwoko Soebianto, 2012:87) mengemukakan adanya tiga variasi bentuk partisipasi, yaitu :

1. Partisipasi terbatas, yaitu partisipasi yang dilaksanakan dalam kegiatan tertentu saja bertujuan untuk tercapainya pembangunan, tetapi untuk kegiatan tertentu yang dianggap menimbulkan kerawanan bagi stabilitas nasional dan kalangan pembangunan sulit diatasi.
2. Partisipasi penuh, artinya partisipasi secara keseluruhan dalam segala aspek pembangunan.
3. Mobilisasi tanpa partisipasi artinya partisipasi yang dibangkitkan oleh pemerintah, tetapi dalam pelaksanaan masyarakat tidak di beri kesempatan untuk mengajukan, kesempatan untuk mempengaruhi jalannya kebijakan pemerintah.

Sedangkan Huraerah (2008:102) mendefinisikan bahwa bentuk partisipasi meliputi :

1. Buah pikiran, yang diberikan dalam pertemuan atau rapat;
2. Partisipasi tenaga, yang di berikan partisipasi dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan, pertolongan bagi orang lain;
3. Partisipasi Keahlian, partisipasi yang diberikan orang untuk mendorong aneka ragam bentuk usaha atau industry;
4. Partisipasi harta benda, yang di berikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, yang biasanya berupa uang dan sebagainya.

• **Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat adalah peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam mengidentifikasi masalah, pengambilan keputusan dan memberikan alternatif solusi melalui pikiran, keahlian, waktu, modal dan atau materi terhadap program yang di laksanakan oleh pemerintah. Sebagai sebuah tujuan, partisipasi merupakan pemberdayaanyaitu setiap orang berhak menyatakan pendapat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupannya. Partisipasi masyarakat adalah hak dan kewajiban seseorang warga Negara untuk memberikan kontribusinya kepada pencapaian tujuan kelompok. Partisipasi dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan semua kemampuan yang di milikinya dalam segala kegiatan yang di laksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan. Partisipasi yang di dorong oleh mental dan emosi di sebut partisipasi otonom, sedangkan partisipasi yang di dorong oleh paksanaan di sebut mobilisasi. Partisipasi mendorong seseorang atau kelompok untuk menyumbang atau mendukung kegiatan bersama berdasarkan kesukarelaan sehingga tumbuh rasa tanggung jawab bersama terhadap kepentingan kelompok atau organisasi.

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007:27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Partisipasi masyarakat menekankan pada partisipasi langsung warga dengan pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan.

Sedangkan menurut Gaventa dan Valderman (dalam Dwiningrum, 2009:34-35) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat telah menggali konsep partisipasi menuju pada suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan di berbagai golongan kecil yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Menurut Dewi, Fandeli dan Baiquni (2013) partisipasi masyarakat merupakan suatu hak yang di miliki masyarakat untuk ikut andil dalam pengambilan keputusan. Keputusan di dalam tahapan proses pembangunan mulai dari awal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pelestarian lingkungan. Di sini masyarakat tidak hanya penerima fasilitas maupun manfaat tetapi sebagai subjek pembangunan yang berkesinambungan.

Dengan demikian partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan dan pelaksanaan (implementasi) program atau proyek pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat lokal. Partisipasi masyarakat memiliki ciri-ciri yang bersifat proaktif dan reaktif (artinya masyarakat ikut menalar baru bertindak), ada kesempatan yang dilakukan oleh semua yang terlibat, ada tindakan yang mengisi kesepakatan tersebut. Ada pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam kedudukan yang setara.

B. Konsep Pembangunan

• Pembangunan

Istilah pembangunan menunjukkan hasil proses pembangunan itu sendiri. Secara etimologi pembangunan berasal dari kata bangun di awalan "pe" dan akiran "an" guna menunjukan prihal orang membangun atau bagaimana pekerjaan membangun itu dilaksanakan .

Secara sederhana pembangunan itu diartikan sebagai suatu perubahan tingkat kesejahteraan secara terukur dan alami. Dalam penyelenggaraan tindakan pembangunan pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai kegiatannya. Dana tersebut dihimpun dari warga Negara dalam bentuk : pajak, pungutan serta yang di peroleh secara internal dari pendapatan bukan pajak dan laba perusahaan public. Kesejahteraan merupakan fokus dari tujuan pembangunan, motivasi pelaku pembangunan dan prioritas biaya pembangunan.

Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan berencana yang di lakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa.

Menurut Suroto, pembangunan merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat guna penetapan tujuan dan sasaran pembangunan pada tiap tahap untuk alokasi sumber-sumber serta untuk mengatasi rintangan keterbatasan dan pertentangan ini untuk melakukan koordinasi kegiatan, di perlukan kebijaksanaan yang memuat program dan cara-cara yang relevan dan efektif yang harus di laksanakan untuk mencapai tujuan pembangunan. Dengan kata lain kebijaksanaan berisi tujuan keseluruhan dan tujuan tiap program yang hendak di capai pada tiap pembangunan, cara yang perlu dilakukan untuk mengatasi semua atau berbagai keterbatasan, rintangan-rintangan dan pertentangan yang ada atau di perkirakan akan terjadi, cara mengalokasikan sumber-sumber pembangunan yang optimal serta cara melakukan koordinasi semua kegiatan yang efektif.

Sedangkan menurut Gultung (dalam Trijono 2007: 13) mengemukakan pembangunan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, baik secara individual maupun kelompok, dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan baik terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan alam.

• Perencanaan Pembangunan

Pengertian perencanaan pembangunan dapat dilihat berdasarkan unsur-unsur yang membentuknya yaitu: perencanaan dan pembangunan. Menurut Suryo Sakti Hadiwijoyo

(2012:7) bahwa teori perencanaan yang ideal ialah yang tidak hanya mampu mengakomodasikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat tetapi juga mampu mamadukan berbagai kepentingan yang terlibat.

Perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternative atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada fakta yang akan di gunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan / aktifitas kemasyarakatan baik yang bersifat fisik maupun nonfisik dalam rangkaian mencapai tujuan yang lebih baik. (Riyadi, 2005).

Lebih lanjut Riyadi dan Bratakusumah (2005 :6) mengemukakan bahwa perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal proses pembangunan. Sebagai tahapan awal maka perencanaan pembangunan merupakan pedoman atau acuan atau dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Karena itu perencanaan pembangunan hendaknya bersifat implementatif (dapat melaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan), serta perlu di susun dalam suatu perencanaan strategis dalam arti tidak terlalu mengatur, penting, mendesak, dan mampu menyentuh kehidupan masyarakat luas., sekaligus mampu mengantisipasi tuntutan perubahan baik internal maupun eksternal, serta di susun berdasarkan fakta riil di lapangan. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan adalah sebagai alat merencanakan untuk masa yang akan datang, untuk melakukan perubahan yang lebih baik dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan tersebut.

- **Perencanaan Pembangunan Desa**

Menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa bahwa: pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Dengan lahirnya Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, semakin nyata bahwa desa mempunyai kewenangan yang sangat luas dalam mengelolah pemerintahannya. Pasal 1 ayat 1 mengatakan peraturan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya di sebut desa, adalah kesatuan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kewenangan begitu besar maka desa wajib membuat perencanaan pembangunan dalam bentuk rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) desa yang dioprasikan dalam kegiatan tahunan dalam bentuk rencana kerja pembangun tahunan desa.

Dalam proses perencanaan pembangunan desa yang harus di lihat dan di pahami bahwa perencanaan pembangunan desa merupakan suatu paduan atau model pengalihan potensi atau gagasan pembangunan desa yang menitikberatkan pada peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan.

Lebih lanjut Supeno (2011:32) mengatakan bahwa secara garis besar perencanaan desa mengandung pengertian sebagai berikut:

1. Perencanaan sebagai rangkaian kegiatan analisis mulai dari identifikasi kebutuhan masyarakat hingga penetapan program pembangunan
2. Perencanaan pembangunan lingkungan, semua program peningkatan kesejahteraan, ketentraman, kemakmuran dan perdamaian masyarakat di lingkungan pemukiman di tingkat RT/RW, Dusun dan Desa
3. Perencanaan pembangunan bertumpuk pada masalah kebutuhan, aspirasi,dan sumber daya manusia setempat
4. Perencanaan desa menjadi wujud nyata peran serta masyarakat dalam pembangunan masa depan.
5. Perencanaan yang menghasilkan program pembangun yang diharapkan dapat memberi dapat peningkatan kesejahteraan, kemakmuran dan perdamaian masyarakat dalam jangka panjang.

Dari apa yang di maksud Supeno tersebut sangatlah jelas bahwa perencanaan pembangunan desa harus melalui proses pengalihan gagasan dan melibatkan masyarakat serta mengidentifikasikan sumber daya yang ada. Ini sejalan dengan pendapat Robinson (2009:5) yang mengemukakan empat elemen dasar perencanaan yaitu : (1) perencanaan berarti memilih,

(2) perencanaan berarti alat mengalokasikan sumber daya, (3) perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan, dan (4) perencanaan berorientasi pada masa depan.

Perencanaan pembangunan desa selain mempertimbangkan kondisi desa, maka desa harus juga memperhatikan perencanaan pembangunan yang ada di atasnya. Dan dalam penyusunan perencanaan pembangunan sebagaimana pendapat para ahli perencanaan harus bersifat jangka panjang. Rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) sebagaimana pasal 79 ayat 1 poin a, rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 6 tahun artinya bahwa perencanaan pembangunan desa sudah memenuhi tujuan yang diharapkan dan dalam operasional dijabarkan dalam rencana kerja tahunan dalam bentuk RKP desa dari gambaran teori menunjukkan bahwa rencana pembangunan merupakan inti dari semua proses dengan perencanaan yang baik diharapkan semua pelaksanaan pembangunan desa dapat terukur dan menjadi lebih baik serta bersifat jangka panjang.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Melalui penelitian ini diharapkan peneliti mampu menghasilkan data yang bersifat deskriptif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah peneliti bermaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah, dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007 : 16). Adapun fokus penelitian ini adalah mengidentifikasi bentuk dan faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa Wori Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara. pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, serta mempelajari dokumentasi yang terkait dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh dianalisis dengan tahapan melakukan reduksi data, display data, dan baru kemudian menarik kesimpulan.

PEMBAHASAN

A. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan

Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kehidupan yang lebih makmur dan sejahtera bagi masyarakat, dalam upaya pembangunan partisipasi masyarakat mempunyai peran yang sangat penting karena pembangunan di tujukan untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri dan dengan adanya peran partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan diharapkan hasil dari pembangunan sesuai dengan apa yang diharapkan dan di butuhkan masyarakat di desa tersebut.

Partisipasi masyarakat adalah sebagai strategi pendukung untuk mengatasi permasalahan pembangunan desa sangatlah penting perannya. Seperti kerja sama antara masyarakat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan dan membiayai pembangunan. Ada dua alasan utama mengapa partisipasi masyarakat itu penting: *pertama*, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat. *Kedua*, masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika mereka dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan. Sehingga nantinya pembangunan yang di laksanakan benar-benar merupakan kebutuhan dari masyarakat.

Perencanaan pembangunan partisipatif adalah perencanaan yang bertujuan melibatkan kepentingan rakyat dan dalam prosesnya melibatkan rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung akan membuat terhindar dari peluang terjadinya manipulasi, dengan adanya keterlibatan masyarakat akan memperjelas apa yang sebetulnya di kehendaki masyarakat. Proses perencanaan pembangunan desa harus melalui serangkaian forum musyawarah dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di wilayah setempat. Perencanaan pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat yang pada umumnya bukan sebagai objek tetapi sekaligus sebagai subjek pembangunan, sehingga nuansa yang dikembangkan dalam perencanaan pembangunan benar-benar dari bawah.

Partisipasi masyarakat Desa Wori dalam perencanaan pembangunan sebelum melakukan pembangunan yang ada di desa di lakukan musyawarah terlebih dahulu di tingkat dusun untuk mengumpulkan dan menerima usulan-usulan dari masyarakat yang terhimpun dengan segala manfaat dan tujuan yang ingin di capai, setelah usulan dari dusun tersebut tertampung kemudian di bahwa untuk di usulkan dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrembang) Desa, Kemudian pemerintah desa menimbang dengan segala manfaat dan tujuannya. Dari situlah pemerintah dapat memutuskan program apa yang akan dijalankan sesuai dengan PAD. Apabilan PAD banyak, dimungkinkan dijalankan program-program yang di usulkan masyarakat setelah di ketahui program yang akan di jalankan maka pemerintah menyusun rencana program pembangunan dengan menentukan program mana yang lebih dahulu di jalankan.

Upaya pembangunan yang terencana dapat di lakukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang di lakukan. Lebih jauh lagi bahwa pembangunan yang tepat sesuai dengan kondisi di suatu wilayah menjadi syarat mutlak dilakukan suatu pembangunan. Perencanaan ada sebagai upaya untuk mengantisipasi ketidak seimbangan yang terjadi. Artinya perubahan pada suatu keseimbangan awal dapa mengakibatkan perubahan pada suatu system sosial yang akhirnya membawa system yang ada menjauhi keseimbangan awal. Perencanaan sebagai bagian dari fungsi manajemen yang bila di tempatkan pada pembangunan akan berperan sebagai arahan bagi proses pembangunan berjalan menuju tujuan, disamping itu akan menjadi tolok ukur keberhasilan proses pembangunan yang di laksanakan.

Salah satu faktor keberhasilan suatu pembangunan di laksanakan dapat di lihat apabila seluruh lapisan aspek masyarakat mulai dari aparat pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta ada peran dari masyarakat dengan terlibat langsung dan bekerja sama dengan baik dengan aparat pemerintah desa setempat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan program-program pembangunan, sampai pada tingkat pengawasan jalannya pembangunan yang ada. Menurut Huraerah (2008 :102) bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembanguana desa meliputi beberapa hal:

1. Partisipasi buah pikiran,
2. Partisipasi tenaga,
3. Partisipasi keahlian
4. Partisipasi harta benda (uang).

Keberhasilan suatu pembangunan tidak dapat di lepaskan dari adanya partisipasi anggota masyarakat baik sebagai satu kesatuan system maupun individu yang merupakan bagian yang sangat penting dalam proses dinamika pembangunan. Karena secara prinsip pembangunan di tujukan guna menjadikan masyarakat sejahtera oleh sebab itu tanggung jawab berhasil tidaknya pembangunan tidak hanya di tangan pemerintah tetapi juga masyarakat. Oleh karena itu kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat merupakan salah satu keberhasilannya pembangunan.

Sehubungan dengan hal itu, dapat di katakan bahwa pembangunan yang sedang dalam proses di tentukan oleh besar kecilnya partisipasi masyarakat yaitu:

1. Partisipasi sebagai titik awal perubahan,
2. Partisipasi dalam memperhatikan, menyerap dan memberikan tanggapan terhadap informasi,
3. Partisipasi dalam perencanaan,
4. Partisipasi dalam melaksanakan oprasional,
5. Partisipasi dalam hal menerima dan mengembangkan hasil pembangunan,
6. Partisipasi dalam menilai pembangunan.

Melihat partisipasi yang ada di Desa Wori Kecamatan Wori Kab. Minahasa Utara dengan corak kehidupan untuk mencapai sukses pembangunan hendaknya lebih mengetahui kemampuan dan keadaan nyata dengan memperhatikan aspek-aspek pokok yang berkaitan dengan pembangunan. Adapun bentuk partisipasi masyarakat yang secara umum mewarnai masyarakat ikut berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan, partisipasi tersebut apabila di klasifikasikan secara ideal maka menurut pengamatan penulis ada empat aspek bentuk ideal partisipasi yang ada di Desa Wori dalam perencanaan pembangunan yaitu partisipasi dalam bentuk ide-ide / buah pikiran, partisipasi dalam bentuk uang, partisipasi dalam bentuk barang

dan partisipasi langsung dalam bentuk tenaga. Ke empat aspek tersebut dapat di lihat melalui uraian penelitian sebagai berikut :

1. Partisipasi Ide-ide / Pemikiran

Partisipasi masyarakat secara langsung mutlak bagi tercapainya tujuan pembangunan. Idealnya sudah merupakan iuran dan partisipasi masyarakat yaitu usaha untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi sehingga proses pembangunan dapat meringankan beban dan akhirnya pembangunan itu dapat di rasakan secara adil dan sejahtera. Demikian pula secara sederhana masyarakat hanya akan dalam aktifitas selanjutnya apabila merasa ikut ambil bagian dalam menentukan apa yang akan di laksanakan.

Hal penting yang perlu di perhatikan adalah kesadaran untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan kehidupan yang di miliki setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Penyaluran ide-ide atau buah pikiran dapat di salurkan melalui lembaga-lembaga formal yang ada. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat yang ada di Desa Wori Kecamatan Wori dalam perencanaan pembangunan maka dapat di lihat dari keikutsertaan masyarakat dalam pertemuan atau rapat-rapat yang di adakan di mana kehadiran masyarakat dalam pertemuan atau rapat masih kurang masyarakat yang hadir.

Dengan demikian menurut penulis dalam penelitian ini bahwa partisipasi masyarakat yang ada di Desa Wori Kecamatan Wori masih belum terlalu maksimal atau belum optimal karna dalam pertemuan/ rapat yang di laksanakan masih bnyak masyarakat yang tidak hadir.

2. Partisipasi dalam bentuk uang

Dalam upaya menggerakkan program pembangunan dana merupakan salah satu penggerak utama yang menentukan dalam penyelenggaraan pembangunan. Kenyataan di lapangan menunjukan bahwa pembangunan tanpa di dorong oleh dana yang memadai maka proses pembangunanya akan pincang dan hal ini merupakan fenomenan umum yang di alami setiap daerah tak terkecuali di Desa Wori. Untuk mengatasi fenomena tersebut di atas, berbagai upaya di lakukan termasuk di dalamnya kemampuan Pemerintah Desa dalam mengarahkan partisipasi masyarakat dalam menghimpun dana yang cukup untuk menyelenggarakan pembangunan secara berkelanjutan.keterlibatan masyarakat dalam partisipasi dalam bentuk uang adalah partisipasi anggota masyarakat yang secara sukarela menyumbangkan uang untuk pembangunan tanpa ada paksaan dari pemerintah atau merasa terpaksa memberikan sumbangan dalam bentuk uang.

Berdasarkan penelitian penulis dan data yang di peroleh melalui informan dalam penelitian ini, maka di ketahui bahwa di Desa Wori partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan uang belum pernah ada karena masyarakat merasa dana yang ada di desa selalu cukup untuk setiap proyek-proyek pembangunan yang di laksanakan atau di lakukan di desa.

3. Partisipasi Dalam Bentuk Keahlian

Partisipasi keahlian merupakan salah satu peran serta masyarakat dalam memberikan sumbangan ketrampilan. Dengan keahlian yang di miliki oleh masyarakat maka dapat membantu kelancaran proyek-proyek pembangunan yang di laksanakan.

Dalam partisipasi keahlian di Desa Wori sudah cukup baik karena jika ada pembagunan yang di lakukan masyarakat yang memiliki ketrampilan di bidang tersebut sering memberikan diri walaupun dalam pengerjaan pembangunan masyarakat tetap di beri upah atau gaji dari tim pelaksana pembangunan walaupun tidak sebanding dengan upah di luar desa yang lebeh tinggi.

4. Partisipasi Dalam Bentuk Barang

Dana merupakan salah satu penggerak utama yang menentukan dalam penyelenggaraan pembangunan, tetapi yang tidak kalah penting juga adalah sumbangan materi berupa barang biasanya di lakukan secara langsung di mana sumbangan materi atau barang tersebut di peruntukan untuk pembangunan yang bersifat fisik seperti pembangunan jalan, saluran air dan sarana- sarana umum lainnya.

Berdasarkan penelitian yang di lakukan tingkat partisipasi masyarakat Desa Wori dalam bentuk barang berdasarkan pengamatan penulis dalam penelitian ini dan berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, partisipasi masyarakat dalam bentuk barang masih

tergolong rendah karena masyarakat lebih banyak berharap dari dana yang di sediahkan oleh pemerintah.

5. Partisipasi Dalam Bentuk Tenaga

Salah satu partisipasi dalam bentuk pembangunan yang merupakan wujud dari rasa tanggungjawab masyarakat adalah adanya sikap saling mendukung terhadap proses pembangunan antara lain ditunjukkan melalui partisipasi aktif brupa tenaga. Sebagaimana di ketahui bahwa tidak semua masyarakat berpartisipasi secara penuh, hal ini di sebabkan karena adanya perbedaan kemampuan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Partisipasi tenaga yang di maksud di sini adalah bagaimana masyarakat terlibat secara langsung dalam pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dan informasi yang di peroleh dari informan bahwa di Desa Wori partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga tergolong belum maksimal atau masih tergolong rendah karena masih ada masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi seperti kerja bakti yang di lakukan masih banyak masyarakat yang tidak memberi diri untuk terlibat langsung dalam kerja bakti.

B. Factor-Factor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa

Sebagaimana di ketahui bahwa pembangunan tidak hanya merupakan usaha pemerintah semata atau masyarakat saja, akan tetapi suatu kegiatan bersama yang hasilnya di harapkan dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Keberhasilan pembangunan Desa Wori merupakan cerminan dari keberhasilan pembangunan daerah, namun demikian peran serta masyarakat dalam proses pembangunan tentunya banyak factor yang mempengaruhi tingkat keterlibatannya dalam pembangunan.

Menurut penelitian yang penulis lakukan, faktor yang mempengaruhi peran serta masyarakat di Desa Wori Kecamatan Wori adalah faktor intern yang meliputi kesadaran dan pendidikan sedangkan factor ekstern meliputi kepemimpinan pemerintah dan peralatan atau fasilitas.

1. Faktor Intern

a. Faktor Kesadaran / Kemauan

Keikutsertaan dalam suatu kegiatan pembangunan bukan timbul begitu saja akan tetapi karena adanya yang mendorong untuk berpartisipasi. Salah satu di antaranya adalah factor kesadaran masyarakat itu sendiri, apabila warga masyarakat sadar mengenai arti pentingnya, maka jelas mereka akan lebih banyak melibatkan diri di dalamnya. Hal ini dimaksudkan agar cita-cita prmbangunan dapat tercapai yakni memberikan hidup sejahtera kepada semua masyarakat. Demikian pula dengan warga masyarakat Desa Wori kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara yang merupakan lokasi penelitian ini.

Mayarakat Desa Wori dalam pembangunan di segala bentuk (partisipasi Ide/ Pemikiran dan tenaga) adalah merupakan bagian besar dari kesadaran yang di miliki oleh masyarakat. Di mana terlihat bahwa kesadaran pribadi yang mendorong untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan. Alasan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan karena adanya suatu kepedulian atau kesadaran untuk ikut terlibat dalam pembangunan tersebut.

b. Faktor Pendidikan

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya berbagai perubahan di muka bumi ini adalah karena factor pendidikan. Jika di hubungkan tingkat pendidikan dengan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, maka kenyataan menunjukkan adanya hubungan yang erat. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi biasanya mempunyai perhatian yang besar terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan yang di lakukan, baik pembangunan yang di lakukan pemerintah maupun swadaya masyarakat. Melalui pendidikan yang tinggi itulah kemudian mereka mengerti tentang arti pentingnya pembangunan yang dilaksanakan dan mereka pada umumnya merasa senang terlibat dalam pembangunan tersebut. Tetapi sebaliknya jika masyarakat yang mempunyai tingkat pendidikan yang rendah maka mereka sulit untuk mengerti apa dan bagaimana pentingnya pembangunan

di laksanakan itu, kemudian timbul sikap yang acuh dan masa bodoh terhadap pembangunan. Kenyataan ini memberikan gambaran betapa besar pengaruh tingkat pendidikan terhadap partisipasi masyarakat.

Perencanaan pembangunan ide-ide atau pemikiran biasanya di keluarkan oleh orang-orang yang memiliki jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan juga banyak di antara yang hadir dalam rapat-rapat pembahasan dalam perencanaan pembangunan yakni orang-orang yang bisa berbica dan memiliki jenjang pendidikan yang tinggi.

2. Faktor Ekstern

a. Kepemimpinan Pemerintah

Telah dikemukakan terdahulu bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Wori Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara khususnya tidak timbul begitu saja melainkan terpengaruh oleh beberapa faktor dan salah satunya adalah Kepemimpinan Pemerintah setempat. Karna masyarakat adalah paduan dari beberapa individu yang mempunyai sifat atau karakter yang berbeda-beda, maka untuk memadukannya di perluhkan suatu kekuatan yakni kemampuan pendinamisan oleh pemimpin pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah desa dan aparatnya, kepemimpinan yang baik dan mampu menyatu dengan karakter masyarakat yang dipimpin dalam membina dan mengarahkan masyarakat untuk berpartisipasi. Tetapi akan terjadi sebaliknya jika kepemimpinan yang di terapkan oleh pemerintah bertantangan dengan sikap dan karakter dari masyarakat yang di pimpin.

Oleh sebab itu keberhasilan pembangunan tidak hanya di lihat dari partisipasi masyarakat tetapi juga kepemimpinan pemerintah dalam hal ini kepala desa dan aparatnya. Berhasilnya masyarakat berpartisipasi dibutuhkan kepemimpinan yang dapat menyatuh dengan sikap dan karakter masyarakat karena dengan kepemimpinan yang baik maka jelas akan mendorong masyarakat untuk patuh dan taat kepada pemerintah.

b. Faktor Peralatan/ Fasilitas

Perlengkapan kantor desa adalah semua peralatan untuk menjamin kelancaran seluruh kegiatan pemerintahan. Secara keseluruhan pada lokasi penelitian peralatan dan perlengkapan kantor sudah memadai. Hal tersebut tentu akan mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan. Khususnya pada upaya peningkatan pelayanan administrasi kepada masyarakat. Oleh karena itu menurut penulis, peralatan atau fasilitas merupakan salah satu factor yang mempengaruhi kepala desa dan aparatnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

PENUTUP

Partisipasi masyarakat Desa Wori dalam mengikuti pelaksanaan rapat rencana pembangunan di desa masih kurang aktif dan masih perlu di tingkatkan karna masih banyak masyarakat yang belum berpartisipasi dan terlibat secara langsung dalam proses pembuatan perencanaan program pembangunan yang akan di laksanakan setiap tahunnya. Hal yang menjadi kendala sehingga masyarakat kurang berpartisipasi dan kurang aktif dalam mengikuti rapat perencanaan pembangunan adalah kurangnya dilibatkan masyarakat secara aktif dalam pembuatan rencana pembangunan di desa sehingga menyebabkan kurang terjalin kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan desa. Selain itu yang menjadi permasalahan yang mendasar adalah kuminikasi yang tidak tau tentang pelaksanaan musrembang karena mereka tidak mendapat undangan/ panggilan dari panitia penyelenggara musrembang yaitu pemerintah desa.

Partisipasi masyarakat yang berbentuk ide-ide/pemikiran, partisipasi masyarakat yang berbentuk sumbangan uang, Partisipasi masyarakat yang berbentuk barang, partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga yang masih tergolong rendah. Faktor-faktor yang memepengaruhi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan meliputi: Factor intern yaitu faktor yang berasal dari dalam diri masyarakat itu sendiri seperti tingkat pendidikan dan yang paling penting adanya kesadaran diri dari masyarakat itu secara pribadi. Dan Factor ekstren yaitu faktor yang berasal dari lingkungan sekitar di luar dari diri masyarakat yang meliputi kepemimpinan pemerintah (kepala desa dan aparatnya) dan peralatan atau fasilitas yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Fandeli dan Baiquni. (2003). **Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Jatiluwih**. Jurnal kawistara, vol.3.
- Handayani, Suci. (2006). **Pelibatan Masyarakat Marginal Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Partisipasi** (cetakan pertama). Surakarta : Kompipsolo
- Haryono Paulus. (2007). **Sosiologi Kota Untuk Arsitek**. Jakarta : Bumi arkasa
- Ibandi Rukminto Adi. (2007). **Perencanaan Partisipasi Berbasis Asset Komunitas**. Depok : Fisip UI Press.
- Khairuddin. (2008). **Sosiologi Keluarga**. Yogyakarta : Liberty.
- Koentjaraningrat. (2009). **Pengantar Ilmu Antropologi**. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, Lexy J. (2007). **Metodologi Penelitian Kualitatif**. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Remiswal Dr. (2013). **Menggugah Partisipasi Gender Dilingkungan Komunitas**. Yogyakarta: Graha ilmu.
- Riyadi dan Bratakusumah. (2005). **Perencanaan Pembangunan Daerah**. Jakarta : PT. Gramedia pusaka utama.
- Siti Irene Astuti Dwiningrum. (2011). **Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan**. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soetomo. (2009). **Pembangunan Masyarakat “Merangkai Sebuah Kerangka”**. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Sugiyono. (2011). **Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D**. Bandung : Alfabeta
- Suryo Sakti Hadiwijoyo. (2012). **Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat; Sebuah Pendekatan Konsep**. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato. (2012). **Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik**. Bandung: CV ALFABETA
- Trijono, Lambang. 2007. **Pembangunan Sebagai Perdamaian**. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Sumber-sumber lain:

- Undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 72 tahun 2005 tentang desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU no 6 tahun 2014 tentang desa.
- Kantor Desa Wori
- <http://woocara.blogspot.com/2016/03/pengertian-masyarakat-ciri-ciri-masyarakat.html#ixzz4vURp69Ea>
- <http://www.dosenpendidikan.com/21-pengertian-pembangunan-menurut-para-ahli-terlengkap>
- Kandati, A., Sumampow, I., & Sampe, S. (2020). PERENCANAAN PEMBANGUNAN MELALUI MUSREMBANG DI DESA BATUMBALANGO. *JURNAL EKSEKUTIF*, 2(5).
- Sembel, T., Gosal, R., & Pangemanan, S. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Sinsingon Barat Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow). *JURNAL EKSEKUTIF*, 1(1)